



**Universitas Katolik Parahyangan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT No. 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Kerjasama Indonesia – FAO Dalam Menangani Kerentanan Pangan di Papua Tahun 2010-2019**

Skripsi

Oleh:  
Ivan Abygail Timisela

2016330130

Bandung  
2020



**Universitas Katolik Parahyangan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT No. 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Kerjasama Indonesia – FAO Dalam Menangani Kerentanan Pangan di Papua Tahun 2010-2019**

Skripsi

Oleh:

Ivan Abygail Timisela

2016330130

Pembimbing

Mangadar Situmorang, Ph.D.

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Hubungan Internasional  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Ivan Abygail Timisela  
Nomor Pokok : 2016330130  
Judul : Kerjasama Indonesia – FAO Dalam Menangani Kerentanan Pangan di Papua Tahun 2010-2019

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Rabu, 29 Juli 2020  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Elisabeth A. Satya Dewi, Ph.D.

:   
-----

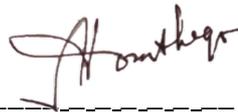
**Sekretaris**

Mangadar Situmorang, Ph.D. :

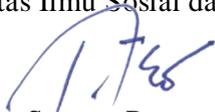
  
-----

**Anggota**

Dr. Atom Ginting Munthe :

  
-----

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

  
Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ivan Abygail Timisela

NPM: 2016330130

Jurusan: Ilmu Hubungan Internasional

Judul: Kerjasama Indonesia – FAO dalam menangani kerentanan pangan di Papua tahun 2010-2019

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan akademik yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 16 Juni 2020



Ivan Abygail Timisela

## ABSTRAK

Nama : Ivan Abygail Timisela

NPM : 2016330130

Judul : Kerjasama Indonesia – FAO Dalam Menangani Kerentanan Pangan di Papua Tahun 2010-2019

---

Penelitian ini memberikan penjelasan dan analisa mengenai apa saja kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan *The Food and Agriculture Organization* (FAO) dalam upaya pencapaian ketahanan pangan atau pengentasan kerentanan pangan di provinsi Papua dalam periode waktu 2010-2019. Kerjasama yang dilakukan pemerintah Indonesia dan FAO terbagi atas tiga kategori besar yaitu: 1) Area Peternakan dan Pertanian; 2) Area Kelautan dan Perikanan; dan 3) Area Kehutanan. Dari ketiga kategori besar tersebut, program dan proyek yang memiliki fokus terhadap masyarakat Papua dan upaya pengentasan kerentanan pangan di Papua baik secara langsung maupun tidak langsung, terdapat di Area Peternakan dan Pertanian. Latar belakang yang mendasari penelitian ini adalah keingintahuan penulis mengenai proyek dan program apa saja yang dilakukan oleh FAO dalam kerjasamanya dengan pemerintah Indonesia di wilayah Papua dari periode waktu yang telah ditentukan. Maka itu dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai program dan proyek dari Area Peternakan dan Pertanian dalam periode waktu yang telah ditentukan dan hasilnya terhadap upaya membantu ketahanan pangan dalam kehidupan masyarakat Papua. Dalam menganalisa kerjasama ini, penulis menggunakan teori Neoliberalisme sebagai teori utama dan konsep Ketahanan Pangan sebagai konsep pendukung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 3 program kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan FAO dalam periode waktu 2010-2019. Hasil dari ketiga program tersebut memiliki dampak positif, tetapi belum bisa dikatakan berhasil dalam memenuhi tujuan utamanya dalam mengatasi permasalahan ketahanan pangan di Papua. Program tersebut juga masih belum dapat mengubah posisi Papua sebagai daerah paling rawan pangan secara signifikan. Tetapi kerjasama tersebut dapat menjadi bukti bahwa hubungan kerjasama yang dilakukan oleh aktor negara dan non-negara dapat berlangsung baik jika dilandaskan oleh kesamaan visi dan misi serta koordinasi antara pemerintah negara dengan aktor non-negara tersebut.

Kata Kunci: FAO, Ketahanan dan Kerentanan Pangan, Kerjasama, Koordinasi, Pemerintah Indonesia

## ABSTRACT

Name : Ivan Abygail Timisela

NPM : 2016330130

Title : Indonesia-FAO Cooperation in Addressing Food Vulnerability in Papua in 2010-2019

---

This study provides an explanation and analysis of what collaboration is being undertaken by the Government of Indonesia with The Food and Agriculture Organization (FAO) in the efforts to achieve food security or alleviate food vulnerability in the Papua province in the 2010-2019 time period. The collaboration between the Indonesian government and FAO is divided into three broad categories, namely: 1) Animal Husbandry and Agriculture Areas; 2) Marine and Fisheries Areas; and 3) Forestry Areas. Of the three broad categories, programs and projects that have a focus on the Papuan people and efforts to alleviate food vulnerability in Papua, both directly and indirectly, are found in the Livestock and Agriculture Areas. The background that underlies this research is the author's curiosity about the projects and programs carried out by FAO in its cooperation with the Indonesian government in the Papua region from a predetermined time period. So that in this study, the author discusses the programs and projects of the Animal Husbandry and Agriculture Areas within a predetermined time period and the results of efforts to help food security in the lives of the people of Papua. In analyzing this collaboration, the author uses the theory of Neoliberalism as the main theory and the concept of Food Security as a supporting concept. The results of this study indicate that there are 3 collaborative programs conducted by Indonesia with FAO in the 2010-2019 time period. The results of the three programs have a positive impact, but it cannot yet be said to be successful in meeting its main objectives in addressing food security problems in Papua. The program also has not been able to significantly change Papua's position as the most food insecure area. But such cooperation can be evidence that the cooperative relationship undertaken by state and non-state actors can take place well if it is based on a common vision and mission and coordination between the state government and the non-state actors.

Keywords: FAO, Food Security and Vulnerability, Cooperation, Coordination, Government of Indonesia

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan pimpinannya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini dan sekaligus mengakhiri masa studi saya dalam jurusan Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan. Penelitian ini membahas mengenai Kerjasama Indonesia – FAO dalam menangani kerentanan pangan di Papua tahun 2010-2019. Sebagai sebuah negara yang menjadi aktor utama dalam Hubungan Internasional, Indonesia menjalin kerjasama dengan berbagai aktor lain, baik negara maupun non-negara. Hubungan kerjasama ini dilandasi oleh kesamaan visi dan upaya pemenuhan kepentingan antar aktor yang terlibat. Dalam penelitian ini saya membahas mengenai hubungan kerjasama pemerintah Indonesia dengan *The Food and Agriculture Organization* (FAO) dalam upaya penangan kerentanan pangan di Papua. Analisis yang dilakukan akan berlandaskan teori Neoliberalisme dan konsep ketahanan pangan dari *Human Security*.

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menambah kepustakaan Ilmu Hubungan Internasional dalam bidang kerjasama pemerintah Indonesia dengan FAO. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran diharapkan oleh penulis demi membuat penelitian ini menjadi lebih baik. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Bandung, 30 Juni 2020



Ivan Abygail Timisela

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, Kawan dan Juruselamat saya, Tuhan Yesus Kristus, atas berkat, rahmat serta bimbingan-Nya lah saya bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dan melewati masa-masa senang dan sulit saya selama melakukan perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan. To God be The Glory.

Terima kasih kepada kedua orang tua saya, Bapak Victor Timisela dan Ibu Sylvia Isawatie Manalu untuk restu, dukungan dan doa yang tak pernah putus menaungi setiap langkah saya dalam mempersiapkan masa depan. Terimakasih atas semua cermin dan teladan yang diberikan, sehingga saya dapat percaya diri menepati langkah saya di jurusan Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan. Terimakasih juga untuk kedua keluarga besar, Manalu dan Timisela, terkhusus Ompung Manalu dan Oma Timisela untuk doa dan dukungan yang tak henti untuk saya, Tuhan Memberkati.

Kepada Dosen pembimbing saya yang terhormat, Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D. Terimakasih Mas atas semua masukan, kritik, saran serta bimbingan yang Mas berikan kepada saya. Ditengah kesibukan beliau sebagai rektor yang harus mengurus Universitas ditengah pandemi Covid 19, beliau masih dengan sabar memberikan masukan dan saran dalam penelitian ini. Hanya Tuhan Yang Maha Esa yang dapat membalaskan semua kebaikan anda Mas, Sehat Selalu. Terimakasih juga kepada dosen penguji saya, Dr. Atom Ginting Munthe (Bang Atom) dan Elisabeth A.S. Dewi, Ph.D (Mba Nophie) untuk semua saran dan kritik saat sidang sehingga menjadikan pembelajaran bagi saya dan masukan baik bagi pengembangan penelitian skripsi saya.

Kepada Mas Rizky Widian, S.IP., M.Si (Mas Aseng), terimakasih Mas untuk semua masukan dan obrolan seru mengenai skripsi saya, sehingga pada akhirnya saya dapat memantapkan diri untuk meneliti mengenai FAO di Papua dan kepada Dr.phil. Aknolt Kristian Pakpahan (Bang Tian) sebagai dosen wali saya, terimakasih bang atas semua bimbingan dan ceritanya tentang Dortmund yang menyadarkan saya bahwa saya belum liat apa-apa disana jika dibandingkan dengan cerita anda, semoga kita bertemu lagi di lain waktu Bang.

Terimakasih juga untuk seluruh dosen jurusan Hubungan Internasional yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu, terimakasih Mas dan Mba sekalian, semua jasa dan kebaikan Mas dan Mba

menjadikan saya seseorang yang mengerti betapa seru dan beragamnya dunia Hubungan Internasional. Sampai jumpa di masa depan Mas dan Mba, Tuhan Memberkati.

Kepada Rizky Yudha, Syauqi Ghisandi, Vio Basro, Rafi Hugo, Damiano Rakai dan Ignasius Samon yang berjasa sebagai panggilan darurat saya ketika membutuhkan info mengenai skripsi dan beberapa sempat menemani saya dalam proses pengerjaan di berbagai tempat di Bandung, Dunkin Donuts Dago contohnya. Terimakasih kawan-kawan atas supportnya.

Kepada Yudiantiyo, Rizky Yudha, Cahyadi Tampake, Ignasius Samon, Damiano Rakai, Rangga Saputra, Valentino Sudibyو dan Yafie Islamayzar, terimakasih bre-bre untuk dukungannya materi dan moril selama masa-masa saya di UNPAR.

Kepada Delegasi *United Kingdom*: Carlos, Uqi, Gab, Aisha, Ica, Fab, Fandi, Ignas, Putu, Rakai, Resandi dan Ocha. Terimakasih untuk semua kerjasama yang sudah kita lakukan dalam perjuangan prakdip yang mewarnai masa-masa akhir perkuliahan saya. See you guys on top!

Kepada Adrian Riachta, Kevin Jonathan, Jeremy Julioardo, Karina Pratiwi, Yudiantiyo, Cahyadi dan Keluarga Besar *Classic Hymns*. Terimakasih karena telah menemani saya dalam fase hidup saya dalam dunia musik maupun non-musik. Kalian akan selalu berada di sekitar saya sampai kapanpun, tidak ada kata berpisah untuk kalian semua, Sampai Jumpa!

Kepada Keluarga Besar Advance (khususnya Akadira dan Onsigbare), RH'16, Mahitala dan seluruh organisasi maupun kepanitiaan yang pernah berhubungan dan turut membentuk saya dalam kehidupan kampus, terimakasih untuk kalian semua, sampai jumpa.

Kepada Hizkia Dandy dan Blessing Gulo. Terima kasih untuk mempercayai saya bergabung dengan kalian, terimakasih juga untuk dukungan pengertian terhadap pengerjaan skripsi yang kian mengganggu agenda pekerjaan. Sampai jumpa besok di Kopo.

Kepada teman gedung 8 saya: Cia, Ryan, Alvar, Geri, Dinda, Dian dan Felix. Terima kasih sudah membantu saya menemani Chacha ketika saya harus berurusan dengan Skripsi saya. Bantuan kalian luarbiasa. See you guys on top!

Kepada semua pihak yang membantu maupun berhubungan dengan saya dalam proses kehidupan saya di UNPAR khususnya Kampus Tiga dan tidak bisa saya ucapkan satu persatu, saya berterimakasih banyak atas kehadiran kalian. See you guys on top!

Untuk mengakhiri ucapan terima kasih saya, kepada Cecilia Carissa Putri Prasetyo. Terima kasih sudah percaya pada saya ketika bahkan saya tidak percaya pada diri saya sendiri. Terima kasih atas ribuan malam anda harus tertidur menunggu saya menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sekarang saya akan berganti peran untuk mendukung penulisan skripsi anda, Ayo Semangat!

## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I “PENDAHULUAN” .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.2.1 Pembatasan Masalah .....	6
1.2.2 Pertanyaan Penelitian .....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4 Kajian Literatur .....	7
1.5 Kerangka Pemikiran .....	10
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	15
1.7 Sistematika Pembahasan .....	15
BAB II “FAO SEBAGAI ORGANISASI PANGAN INTERNASIONAL.....	17
2.1 <i>The Food and Agriculture Organization (FAO)</i> .....	17
2.2 Keanggotaan Indonesia dalam FAO .....	24
BAB III “KERENTANAN PANGAN DI PAPUA” .....	28
3.1 Ketahanan dan Kerentanan Pangan di Indonesia.....	28
3.2 Kerentanan Pangan di Papua.....	36
BAB IV “PROGRAM dan PROYEK FAO di PAPUA PERIODE 2010-2019” .....	40
4.1 Program dan Proyek FAO di Papua periode 2010-2019 : Program dan Proyek dengan Fokus Area Pertanian dan Peternakan.....	41

4.2 Analisa Neoliberalisme Terhadap Program dan Proyek FAO dalam Menegakan ketahanan Pangan di Papua .....	51
BAB V “KESIMPULAN” .....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	59

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Papua sebagai sebuah pulau besar paling timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki berbagai macam permasalahan yang terjadi dalam dinamika hidup masyarakatnya. Dari hal yang paling mendasar yaitu sosio-budaya hingga permasalahan kesejahteraan. Permasalahan kesejahteraan yang paling signifikan yaitu ketahanan pangan. Kelaparan menjadi bagian dari tugas utama pemerintah Indonesia dalam membenahi Papua menjadi wilayah yang lebih baik. Hingga tahun 2019, 40% penduduk Papua berpendapatan rendah.

Hal ini berimplikasi langsung kepada Garis Kemiskinan Makanan (GKM) wilayah Papua yang merupakan salah satu faktor penentu Garis Kemiskinan<sup>1</sup>. Jika dilihat dari PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) Papua termasuk besar yaitu diatas 11 juta rupiah per kapita dan mayoritas berasal dari sumber daya alam Papua itu sendiri<sup>2</sup>. Tetapi walaupun pendapatan regional yang cukup besar, rakyat Papua tidak serta merta dapat merasakan hal tersebut. Kesulitan masyarakat dalam mengakses kebutuhan pokok menjadi kendala yang dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat di Papua. Hal tersebut bertambah buruk ketika jumlah transmigran dari luar Papua jumlahnya lebih dominan dari penduduk asli Papua. Berdasarkan sensus tahun 2000 dinyatakan bahwa 70% dari 100% penduduk Papua adalah transmigran dari luar Papua<sup>3</sup>. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara pendatang dan masyarakat asli Papua. Pendatang yang sebagian besar berasal dari pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan mendapatkan bagian yang lebih menguntungkan dari pertumbuhan PDRB Papua.

Ketahanan Pangan yang rendah mengakibatkan wilayah pedalaman Papua sering mengalami kasus gizi buruk dan bahkan beberapa kasus sampai merenggut nyawa. Pada tahun 2013 pemprov Papua telah menyusun 7 agenda pengelolaan SDA untuk mendukung

---

<sup>1</sup> Kemiskinan-BPS Provinsi Papua” Badan Pusat Statistik. Diakses pada 7 Februari 2020. <https://papua.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab1>.

<sup>2</sup> “PDRB Papua Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2010-Triwulan 4 2018.” papua.bps.go.id, n.d. <https://papua.bps.go.id>.

<sup>3</sup> Yulia Sugandi. “Analisis Konflik Dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua.” Friedrich-Ebert-Stiftung, 2008.

perekonomian masyarakat yang disusun dalam nomor 12 RPJMD Papua 2013-2018 sebagai berikut:

1. Optimalisasi lahan produksi pertanian/perkebunan/peternakan/perikanan/kehutanan;
2. Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan daerah;
3. Mewujudkan kecukupan pangan dan gizi masyarakat;
4. Meningkatkan produksi pertanian yang berbasis sumber daya lokal;
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan petani;
6. Penyediaan tenaga penyuluh/ pendamping ditingkat masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
7. Implementasi prospek di seluruh kabupaten/kota se-Papua<sup>4</sup>.

RPJMD tersebut idealnya terealisasi pada tahun 2017-2018 jika sesuai dengan strategi awal. Tetapi hal tersebut dapat dikatakan tidak terealisasi dengan baik dengan adanya kasus gizi buruk pada tahun 2017-2018. Mengambil contoh, pada tahun awal tahun 2018, 6 orang meninggal di suku pedalaman Asmat<sup>5</sup>, 23 balita meninggal dunia di kampung Pdam, dan 27 orang meninggal dunia di Distrik Oksibil<sup>6</sup> karena gizi buruk. Gizi buruk di wilayah Papua terjadi karena banyaknya wilayah Papua yang tertutup oleh rawa yang rindang dan juga sungai yang banyak sehingga sulit untuk mencapai bahan pangan yang tersedia di kota dan juga akses kepada binatang ternak yang tinggi kandungan proteinnya, sehingga kebutuhan nutrisi terhambat. Selain itu juga luas daerah yang sulit dijangkau oleh transportasi menjadi salah satu faktor penghambat strategi.

Dengan ini wilayah Papua masuk kedalam salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kerentanan pangan yang tinggi jika dilihat dari Peta Ketahanan dan Kerentanan pangan tahun 2015. Ada beberapa faktor yang turut berkontribusi dalam mengakibatkan kerawanan pangan di Provinsi Papua:

---

<sup>4</sup> "PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2013-2018." bappedda Papua, n.d.

<https://bappeda.papua.go.id/dokumen/RPJMD>.

<sup>5</sup> Suastha, Riva Dessthanian. "PBB Sebut Kasus Gizi Buruk Di Asmat Papua Insiden Tragis." internasional, April 18, 2018. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180418144828-106-291739/pbb-sebut-kasus-gizi-buruk-di-asmat-papua-insiden-tragis>.

<sup>6</sup> "Persoalan Gizi Buruk Di Papua Meluas." Kliping Kemkes, n.d.

<http://www.kliping.kemkes.go.id/upload/d8ffaca19f576f84b420fd7b63bb7991.pdf>.

1. Akses Pangan Masyarakat

Akses terhadap pangan berpengaruh terhadap pencapaian ketahanan pangan suatu daerah. Secara geografis, wilayah Papua memiliki akses yang cukup sulit untuk dijangkau sehingga butuh usaha yang strategis dalam mendistribusikan pangan agar merata.

2. Harga Pangan dan Non Pangan yang tidak Stabil

Akses dari masyarakat terhadap kebutuhan pangan akan terpenuhi jika harga pangan yang disediakan stabil dan terkendali sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan gizinya. Diperlukan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi agar harga kebutuhan pangan di Papua dapat terkendali.

3. Pengetahuan Masyarakat akan Pola Pangan Bergizi dan Sehat yang kurang

Kualitas hidup masyarakat yang baik akan ditentukan oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat tersebut terhadap Pangan yang bergizi dan sehat. Merupakan kewajiban pemerintah untuk mengedukasi masyarakat mengenai Pangan bergizi dan sehat yang sudah diatur dalam undang-undang pangan no.18 tahun 2012.

4. Akses Wilayah Terisolasi

Wilayah Papua memiliki kondisi Geografis yang berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia. Daratan yang berbukit dan dipenuhi hutan lebat menghambat akses untuk melakukan pembangunan infrastruktur, sehingga masyarakat Papua kesulitan untuk mendapatkan akses kepada kebutuhan pangan mereka. Walaupun secara fakta pemerintah Indonesia telah berhasil melaksanakan pembangunan infrastruktur dalam 10 tahun terakhir, tetapi masyarakat Papua tetap merasa termarjinalkan karena dalam proses pembangunan di tanah mereka, masyarakat Papua merasa tidak diikutsertakan. Sehingga masalah sosial politik dan kultural tidak terselesaikan dengan baik.

5. Komitmen Politik untuk Kesejahteraan Papua yang tidak terealisasi

Ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Papua dapat ditangani jika kecukupan ekonomi terpenuhi. Dengan hal tersebut juga, keteraturan sosial yang kondusif dapat dicapai jika tidak adanya ketimpangan. Komitmen antara pemerintah

pusat, pemerintah provinsi dan masyarakat Papua harus mencapai titik temu sehingga pembangunan dapat berjalan. Tetapi fakta yang saat ini terjadi adalah absennya komitmen politik untuk kesejahteraan orang asli Papua, sehingga pendatang baik dari dalam dan luar negeri mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dari orang asli Papua. Hal tersebut menimbulkan tensi yang mempengaruhi kerentanan pangan di Papua<sup>7</sup>.

Ketahanan pangan di Papua dapat diatasi jika ke-lima point diatas menjadi perhatian pemerintah dalam melakukan pembangunan di Papua. Kesejahteraan tidak dapat tercapai jika hanya salah satu poin saja yang terpenuhi dan mengabaikan yang lain. Di saat negara tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka aktor non-negara seperti institusi internasional dan organisasi internasional mengambil peran dalam membantu negara demi kesejahteraan rakyatnya, sehingga idealnya peran dari aktor non-negara tersebut dapat membantu negara dalam memenuhi tanggung-jawabnya dalam memenuhi kesejahteraan rakyatnya, dalam konteks ini adalah kerentanan pangan masyarakat Papua.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Indonesia menjadi bagian dari berbagai organisasi internasional yang ada. Mulai dari organisasi internasional dari bidang hukum hingga bidang kemanusiaan. Setiap organisasi memiliki dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang sehingga legalitasnya menjadi sah dimata hukum. Dalam pelaksanaannya juga, organisasi-organisasi internasional tersebut diwakili oleh unit terkait di Kementrian Luar Negeri sehingga setiap kementrian dapat mewakili Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Salah satu organisasi internasional tersebut adalah The Food and Agriculture Organization (FAO).

FAO merupakan salah satu badan khusus yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memimpin upaya internasional dalam hal pengentasan kelaparan. Tujuan utama FAO adalah untuk membantu negara-negara anggota PBB untuk mencapai keamanan pangan dan memastikan semua orang mendapatkan akses yang cukup kepada makanan berkualitas tinggi demi hidup yang lebih aktif dan sehat. Dengan lebih dari 194 negara anggota,

---

<sup>7</sup> Yulinda Nurul Aini, "Analisis Faktor dan Pemetaan Ketahanan Pangan Provinsi Papua dalam Upaya Mendukung Sustainable Development Goal's di Indonesia" dalam "Menaksir Gerak dan Arah Pembangunan Indonesia Timur".2019.

FAO bekerja di 130 negara seluruh dunia. Dibentuk pada tahun 1945 di Quebec City, Canada, FAO berdiri dengan kesadaran bahwa keamanan pangan merupakan ancaman baru yang perlu diatasi. Dengan bantuan dari negara anggota, pada tahun 1946 FAO melakukan survey makanan dunia pertama. Survey ini dilakukan di 70 negara untuk menganalisa bagaimana keadaan keamanan pangan saat itu. Dari hasil sensus, pada tahun 1950 FAO membentuk standar internasional untuk keamanan pangan yang meliputi konsep, definisi dan metodologi<sup>8</sup>.

Pada tahun 1948, tepatnya 3 tahun setelah FAO dibentuk, Indonesia menjadi anggota FAO. Representasi FAO untuk Indonesia didirikan pada tahun 1978. Dasar hukum keanggotaan Republik Indonesia di FAO diatur dalam Kepmenlu No 1162/78/01 dan unit terkait yang bertugas di FAO adalah Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI (Dit. PPIH)<sup>9</sup>. Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan FAO tidak hanya di dalam bidang keamanan pangan saja, tetapi dalam bidang agrikultur, perikanan dan kehutanan. Sampai dengan saat ini, sudah lebih dari 650 proyek dan program yang diimplementasikan FAO di Indonesia. Proyek dan program tersebut dibantu oleh lebih dari 1600 ahli dan konsultan baik dari dalam dan luar negeri. Representasi FAO di Indonesia memiliki beberapa cakupan tugas yaitu:

1. Mengembangkan, mempromosikan dan mengawasi strategi untuk keamanan pangan agrikultur dan pembangunan daerah pedesaan;
2. Mengembangkan dan mengimplementasikan program lapangan FAO dengan mengidentifikasi dan memformulasikan program-program baru dan proyek dengan cara bekerja sama dengan pemegang kepentingan dan representasi donor;
3. Membantu pemerintah untuk mencegah bencana, menilai dampak dan membantu dalam merekonstruksi dan merehabilitasi sektor agrikultur terdampak;
4. Melakukan kegiatan yang menumbuhkan kesadaran publik untuk mendukung kegiatan FAO
5. Menyediakan bantuan teknis dan misi investasi dari kantor pusat FAO dan kantor regional maupun sub-regional kepada negara;

---

<sup>8</sup> "About FAO." Food and Agriculture Organization of the United Nations. Accessed February 10, 2020. <http://www.fao.org/about/en/>.

<sup>9</sup> "KEANGGOTAAN INDONESIA PADA ORGANISASI INTERNASIONAL." kemlu.go.id, n.d. <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9LZWFuZ2dvdGFhbl9JbmRvbmVzaWFFcGFkYV9PSS5wZGY=>.

6. Berfungsi sebagai saluran layanan FAO kepada pemerintah dan mitra-mitra lainnya (lembaga donor, LSM, Organisasi Masyarakat Sipil, lembaga penelitian, dan lainnya);
7. Memberikan informasi terkini kepada FAO mengenai perkembangan sosial dan ekonomi negara dan memantau situasi sektor agrikultur di negara tersebut;
8. Mewakili FAO di depan pemerintah negara tuan rumah dan semua mitra yang terlibat dalam aktifitas FAO<sup>10</sup>.

Dengan tujuan-tujuan diatas, FAO sebagai badan internasional memiliki peran yang cukup penting dalam membantu pemerintah Indonesia dalam mencapai keamanan pangan dan pengembangan kualitas dalam bidang agrikultur.

Dalam hal kelengkapan gizi, FAO mengestimasi bahwa masih ada 19.4 juta orang Indonesia yang masih mengalami kekurangan gizi dalam periode 2014-2016<sup>11</sup>. Sedangkan untuk daerah Papua sendiri terdapat 32.8 persen penderita gizi buruk untuk anak berusia 0-15 tahun<sup>12</sup>. Data tersebut menggambarkan bagaimana masyarakat Papua masih belum mendapatkan akses yang baik kepada pangan berkualitas sejak dini.

### **1.2.1 Pembatasan Masalah**

Seperti dalam pembahasan yang dilakukan dalam latar belakang masalah dan identifikasi masalah, pembatasan masalah yang dipilih oleh peneliti adalah sejak tahun 2010 hingga tahun 2019. Pada periode tersebut, FAO menjalankan 3 program utama yang memiliki dampak langsung terhadap ketahanan pangan provinsi Papua yaitu, program pengendalian penyakit ternak Influenza Aviogenik Sangat Patogen (Flu Burung/HPAI) pada tahun 2011, program *World Food Programme* (WFP) untuk memberikan bantuan makanan dalam keadaan darurat dan bekerja dengan masyarakat untuk meningkatkan nutrisi dan membangun ketahanan pangan<sup>13</sup> pada tahun 2015, dan program Pemanfaatan Pati Sagu pada tahun 2016. Dengan adanya program-program tersebut, FAO berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia dan lembaga-

---

<sup>10</sup> "FAO.org." FAO in Indonesia | FAO in Indonesia | Food and Agriculture Organization of the United Nations. Accessed February 10, 2020. <http://www.fao.org/indonesia/fao-in-indonesia/en/>.

<sup>11</sup> "FAO.org." Indonesia at a glance | FAO in Indonesia | Food and Agriculture Organization of the United Nations. Accessed February 12, 2020. <http://www.fao.org/indonesia/fao-in-indonesia/indonesia-at-a-glance/en/>.

<sup>12</sup> "Buku Saku Pemantauan Status Gizi." kesmas.kemkes.go.id, n.d. [http://www.kesmas.kemkes.go.id/assets/upload/dir\\_519d41d8cd98f00/files/Buku-Saku-Nasional-PSG-2017\\_975.pdf](http://www.kesmas.kemkes.go.id/assets/upload/dir_519d41d8cd98f00/files/Buku-Saku-Nasional-PSG-2017_975.pdf).

<sup>13</sup> "World Food Programme- Overview". [Wfp.org/overview](http://wfp.org/overview).

lembaga pemerintahan lainnya dalam membantu memperbaiki kondisi ketahanan pangan di Papua.

Batas waktu ini dipilih karena penulis ingin menganalisa bagaimana andil FAO selama 1 dekade terhadap kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Selain itu penulis juga ingin mendapatkan data terkini mengenai perkembangan kerjasama pemerintah Indonesia dengan FAO tersebut sehingga penelitian terkait dapat memberikan dampak akademis yang terkini.

### **1.2.2 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan temuan yang penulis baca dari sumber di internet, fokus penulisan yaitu untuk mengetahui apa saja kerjasama yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan FAO selama satu dekade 2010-2019. Maka dengan itu penulis merumuskan sebuah pertanyaan penelitian yaitu *apa saja kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan FAO dalam menangani kerentanan pangan di Papua?*

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisa peranan FAO dalam melakukan kerjasama dalam mengentaskan kerentanan pangan di Papua pada periode 2010-2019.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai apa saja peranan FAO sebagai aktor non-negara dalam mengatasi permasalahan kerentanan pangan yang terjadi di Papua. Selain hal tersebut, penulis juga berharap agar pembaca mengetahui proyek dan program apa saja yang sudah diinisiasi oleh FAO dalam rangka kerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam hal mengatasi kerentanan pangan. .

## **1.4 Kajian Literatur**

*Jurnal akademik oleh Yulinda Nurul Aini dan Fuat Edi Kurniawan “Analisis Faktor dan Pemetaan Ketahanan Pangan Provinsi Papua dalam Upaya Mendukung Sustainable*

*Development Goal's di Indonesia” penerbit “Program Studi Antropologi. Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya.*

Dalam paper ilmiah ini menjelaskan mengenai bagaimana UNDP menyusun agenda SDG's (*Sustainable Development Goal's*) yang merupakan agenda pembangunan dunia. SDG's terdiri dari 17 tujuan yang salah satunya adalah untuk mengakhiri kelaparan dan mencapai ketahanan pangan. Dalam paper ilmiah ini, Aini lebih memfokuskan terhadap pembahasan apa itu ketahanan pangan dan kondisi ketahanan pangan di Papua. Sudut pandang yang diambil lebih kearah saintifik dan kebijakan daerah sehingga menjadikan paper ilmiah ini lebih domestik. Sedangkan dalam skripsi penulis, ketahanan pangan yang dibahas dalam skripsi lebih mengarah kepada kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan FAO dalam mengatasi kerentanan pangan di Papua. Sehingga sudut pandang penelitian lebih luas dan melibatkan aktor hubungan internasional.

Meskipun demikian, penulis mendapatkan banyak masukan dari tulisan Aini. Beberapa poin utama Aini dijadikan data sekunder oleh penulis untuk melengkapi data primer yang penulis dapatkan. Aini juga menyertakan beberapa tabel data mengenai kerentanan pangan di Papua serta komponen-komponen penentu kerentanan. Sehingga paper ilmiah Aini berkontribusi dalam membentuk sudut pandang penulis mengenai bagaimana pemetaan ketahanan pangan di Papua dan membantu penulis dalam memahami bagaimana analisis statistik yang saintifik dapat membantu analisis kualitatif milik penulis<sup>14</sup>.

*Skripsi oleh Edwin Pramudita berjudul “Kerjasama Indonesia-FAO (The Food and Agriculture Organization) Melalui WFP (World Food Programme) untuk Ketahanan Pangan di Indonesia Studi Kasus: Wilayah Papua (2012-2015) didokumentasikan oleh Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.*

Secara garis besar, skripsi ini memiliki pembahasan yang cukup mirip dengan skripsi penulis. Dimana Pramudita menganalisa bagaimana program WFP yang diinisiasi oleh FAO membantu pemerintah Indonesia dalam menangani kerentanan pangan di Papua. Dalam skripsi ini juga, Pramudita membahas bagaimana absennya pemerintah Indonesia dalam perkembangan

---

<sup>14</sup> Aini, Yulinda Nurul “Analisis Faktor dan Pemetaan Ketahanan Pangan Provinsi Papua dalam Upaya Mendukung Sustainable Development Goal's di Indonesia” Program Studi Antropologi. Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya.

masyarakat Papua menggerakkan FAO untuk menjalankan program WFP di Papua. Sekilas skripsi Pramudita memiliki kemiripan dengan skripsi penulis, tetapi hal yang membedakan yaitu lebih kepada apa yang dibahas dan teori yang dipakai.

Dalam skripsi Pramudita, beliau lebih menekankan bagaimana WFP membantu pemerintah dalam bentuk program FAO. Fokus Pramudita dalam menulis lebih kepada 1 program saja, sedangkan penulis memfokuskan apa yang dicapai dalam kerjasama Indonesia – FAO dari tahun 2010-2019 dalam mengatasi kerentanan pangan di Papua. Sehingga wilayah penelitian penulis lebih luas dan program WFP merupakan salah satu faktor pembahasan bukan menjadi ide utama pembahasan. Tetapi penelitian Pramudita memberikan penulis masukan yang sangat membantu dimana data penelitian merupakan data yang tidak jauh berbeda, sehingga memudahkan penulis dalam men-triangulasi data yang didapatkan. Penelitian Pramudita juga memberikan sudut pandang baru bagi penulis mengenai bagaimana menganalisa isu *food security* yang merupakan isu keamanan non-tradisional. Penelitian ilmiah Pramudita membantu penulis dalam menambah wawasan mengenai isu yang sedang diteliti<sup>15</sup>.

*Artikel Jurnal oleh Michelle Engel Limenta dan Sianti Chandra berjudul “Indonesian Food Security Policy” didokumentasikan oleh Center for International Trade and Investment, Faculty of Law at Universitas Pelita Harapan.*

Artikel jurnal ini membahas mengenai bagaimana konsep ketahanan pangan Indonesia memiliki kebijakan yang diatur oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ketahanan pangan merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan hajat hidup banyak orang sehingga negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki dasar hukum yang mengatur hal tersebut. Jurnal tersebut menyebutkan bahwa pasal 33 Undang-Undang Dasar memiliki dasar hukum untuk mempergunakan sumber daya alamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan mengatur dan mengeluarkan kebijakan terkait. Indonesia lebih menekankan pada program swasembada dalam mencapai ketahanan pangan, tetapi dalam undang-undang juga diatur bahwa impor dilakukan apabila produksi lokal tidak dapat mencukupi swasembada pangan. Perntanyaan muncul ketika swasembada pangan tidak dapat menjamin seluruh rakyat dapat mengakses pangan yang cukup dan bernutrisi. Dengan fakta tersebut, penulis artikel jurnal

---

<sup>15</sup> Pramudita Edwin “Kerjasama Indonesia-FAO (The Food and Agriculture Organization) Melalui WFP (World Food Programme) untuk Ketahanan Pangan di Indonesia Studi Kasus: Wilayah Papua (2012-2015)” UPN Veteran Jakarta.

tersebut membahas bahwa program swasembada pangan yang dikerucutkan dalam kebijakan terkait pangan belum dapat optimal dalam implementasinya, sehingga Indonesia masih membutuhkan peran negara lain dalam membantu Indonesia dalam ketahanan pangan dalam negeri. Hubungan antara artikel jurnal tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan FAO merupakan salah satu contoh bentuk kerjasama yang menekankan bahwa Indonesia masih membutuhkan peran aktor lain dalam mencapai ketahanan pangan di dalam negeri, dalam contoh kasus penelitian ini adalah di Papua<sup>16</sup>

### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Dalam membahas isu terkait, penulis menggunakan 1 teori dan 2 konsep. Teori yang dipakai adalah teori neoliberalisme yang berfokus pada bagaimana mencapai kerjasama antar negara sebagai aktor internasional dengan aktor lain yang berkontribusi dalam dunia politik internasional. Neoliberalisme juga percaya bahwa kerjasama internasional adalah sesuatu yang dapat dilakukan demi mencapai tujuan bersama. Institusi internasional mendapat peranan penting dalam teori neoliberalisme, karena dalam teori neoliberalisme, negara masih memegang peran penting tetapi juga percaya bahwa institusi internasional merupakan bentuk kerjasama nyata yang dapat membawa kepentingan negara ke arah yang lebih nyata dan juga dapat terealisasi dengan baik<sup>17</sup>.

Teori kedua yang akan dipakai oleh penulis adalah teori Keamanan Non-tradisional. Dunia hubungan internasional mengalami pendalaman isu dimana bukan hal tradisional saja yang menjadi fokus utama tetapi ancaman non-tradisional sudah menjadi bagian perdebatan pasca perang dingin. Masa dimana sebelum perang dingin aktor-aktor politik internasional lebih fokus terhadap permasalahan keamanan tradisional, yang tidak lain adalah ancaman yang bersifat lebih state-centric dan orientasinya lebih ke ancaman militer. Sesudah masa kejatuhan Uni-Soviet, akademisi hubungan internasional memperdebatkan definisi keamanan selama lebih dari dua dekade. Argument akademisi pada masa pasca perang dingin adalah bahwa konsep keamanan negara dan batas-batasnya tidak selalu berlandaskan perang antar negara, tetapi pada beberapa kasus ancaman tersebut berasal dari isu identitas, sejarah dan sumber daya yang adalah bukan

---

<sup>16</sup> Limenta, Michelle Engel, "Indonesian Food Security Policy" hlm 248-249

<sup>17</sup> Dunne, Kurki, Smith, "International Relations Theories" hlm 114-115.

merupakan ancaman militer yang berasal dari kajian keamanan tradisional. Argumen tersebut menguat setelah ditemukannya banyak kasus sesuai perkembangan dunia politik internasional pada masa pasca kolonial di Asia dan Afrika dimana tetap terjadi gerakan separatis di negara sendiri, tensi antar etnis, dan kesenjangan ekonomi yang mengakibatkan ancaman baru bagi negara<sup>18</sup>.

Pengertian kajian keamanan non-tradisional adalah kajian keamanan yang telah mengalami perluasan makna dan pengertian dimana konsep keamanan sudah bergeser dari keamanan yang bersifat state-centric, military-oriented. Pengkajian keamanan non-tradisional mendapatkan banyak masukan dari akademisi-akademisi hubungan internasional yang berasal dari negara dunia ketiga atau negara berkembang. Para akademisi tersebut mencari pemecahan-masalah yang lebih relevan terhadap kondisi negara-negara mereka dimana ancaman militer tidak selalu merepresentasikan kondisi keamanan di negara-negara tersebut. Dari hasil pengkajian tersebut, para akademisi membuat sebuah kode yang menyamakan bahasa keamanan mereka dan diterbitkan oleh UNDP. Kode tersebut adalah keamanan manusia berarti ‘terbebas dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit dan kekerasan’ dan yang kedua berarti ‘perlindungan dari gangguan yang tiba-tiba dan menyakitkan dalam pola kehidupan sehari-hari baik di rumah, di pekerjaan atau di masyarakat’. Dari aspek utama tersebut, muncul 7 aspek keamanan non-tradisional yang melingkupi keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan personal, keamanan komunitas dan keamanan politik. UNDP mempersingkat 7 aspek tersebut menjadi kebebasan dari ketakutan dan kebebasan dari keinginan<sup>19</sup>.

Keamanan Pangan merupakan salah satu elemen dari tujuh elemen yang membangun konsep Human Security yang berkembang pada Human Development Report tahun 1994 oleh UNDP. Pada laporan tersebut UNPD menekankan bahwa keamanan harus diinterpretasikan sebagai:

- Keamanan dari manusia, bukan hanya keamanan wilayah
- Keamanan dari individu, bukan hanya keamanan negara

---

<sup>18</sup> Anthony, Mely Caballero. "Understanding Non-Traditional Security." *An Introduction to Non-Traditional Security Studies a Transnational Approach*, hlm 5–6. 17/2/2020

<sup>19</sup> Ibid hlm. 8

- Keamanan melalui pembangunan, bukan keamanan melalui persenjataan
- Keamanan dari semua orang dimanapun – di rumah-rumah mereka, di tempat kerja, di jalanan, di dalam komunitas, di lingkungan .

Konsep Ketahanan Pangan sendiri telah ditentukan sebagai sebuah hak asasi dasar pada International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights pada 1966. Perjanjian tersebut secara garis besar ingin menekankan bahwa hak dasar manusia adalah terbebas dari kelaparan dan perjanjian tersebut juga mengajak negara agar bertindak baik secara mandiri ataupun dengan melakukan kerjasama secara internasional dengan aktor-aktor lain untuk meningkatkan metode produksi, konservasi dan distribusi pangan; untuk memastikan distribusi yang adil dari pangan dunia . Konsep *food security* atau keamanan pangan merupakan salah satu bagian dari kajian teori keamanan non-tradisional. Pangan merupakan salah satu faktor yang dimasukkan kedalam 7 aspek keamanan non-tradisional. Seiring berkembangnya dunia politik internasional, para aktor hubungan internasional sadar bahwa pangan merupakan salah satu cara untuk dapat menilai ketahanan suatu negara. Kesejahteraan rakyat akan pangan dari sebuah negara dapat mencerminkan bagaimana kapabilitas negara tersebut menjalankan perannya. Pangan yang sebelumnya termasuk kedalam keaman ekonomi mengalami pergeseran makna ketika terjadi krisis pangan pada tahun 2007-2008. Pada saat krisis tersebut dan harga pangan melambung naik, terjadi kekacauan di banyak negara dan mengancam legitimasi dan stabilitas banyak negara. Hal tersebut menjadi argument afirmasi bagi pemikiran Amartya Sen pada tahun 1981 yang menyebutkan bahwa ketahanan pangan merupakan hak asasi manusia dasar dan hal tersebut berbeda dari isu keamanan ekonomi. Kelaparan merupakan sebuah kekerasan terstruktur menurut Sen, dan argumentasi tersebut terbukti pada saat krisis pangan. Pangan dapat menjadi alat politik dan juga dapat menjadi symbol dari kekuatan politik sebuah negara. Keamanan pangan merupakan hak asasi dasar yang harus dimiliki setiap manusia menurut International Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights pada 1976. Pada tahun 1996, FAO mendefinisikan keamanan pangan sebagai kondisi dimana semua manusia di manapun memiliki akses secara fisik, sosial dan ekonomi kepada pangan yang cukup, sehat dan bernutrisi untuk

kehidupan mereka sesuai preferensi makanannya demi hidup yang sehat dan aktif<sup>20</sup>. Klasifikasi keamanan pangan terbagi atas 4 dimensi:

### 1. Ketersediaan

Dimensi pertama ini membahas mengenai ketersediaan pasokan pangan seperti produksi primer tanaman dan hewan serta apakah diambil dari cadangan pangan atau impor pangan. Beberapa faktor yang memberikan dampak pada ketersediaan pangan yaitu, perubahan pasokan dan harga dari bahan pokok seperti pupuk dan bibit, faktor eksternal seperti keadaan agro-ekosistem, perubahan iklim dan persaingan lahan yang merubah hasil panen. Pemborosan pangan yang menyebabkan menumpuknya limbah berdampak pula pada ketersediaan pangan.

### 2. Akses Fisik dan Ekonomi

Dimensi kedua adalah akses kepada pangan tersebut baik secara fisik maupun ekonomi. Konsumen yang tidak lain adalah anggota rumah tangga harus memiliki akses yang baik terhadap pangan. Faktor yang dapat mempengaruhi akses tersebut adalah infrastruktur yang buruk, distribusi logistik pangan yang tidak memadai, ketidaksempurnaan pada pasar, dan konflik atau perang. Sedangkan untuk akses ekonomi dipengaruhi oleh faktor daerah. Dimana konsumen daerah pinggiran tidak akan memiliki stabilitas ekonomi sebaik konsumen di perkotaan atau kawasan ekonomi. Sehingga tarif dari pangan akan sangat mempengaruhi kesejahteraan jenis konsumen pinggiran. Pengelolaan akses ekonomi yang baik menjadi kunci bagi tantangan akses ekonomi karena kenaikan tarif yang kecil akan berpengaruh terhadap makanan konsumen sektor pinggiran sehingga akan lebih rentan untuk kesenjangan dan pembangkangan sipil.

### 3. Pemanfaatan

Dimensi ketiga adalah pemanfaatan yang dimana akan tercermin dalam status gizi masyarakat yang diteliti. Di dalam rantai pasokan pangan, pemanfaatan pangan dapat berpengaruh dari bagaimana pangan tersebut di proses, di kemas, di pasarkan dan di distribusikan. Faktor-faktor tersebut memiliki implikasi terhadap bagaimana pangan

---

<sup>20</sup> Loc.Cit Anthony, Mely Caballero halaman 115-117 17/2/2020

dapat mencapai manfaat terbaiknya dan tetap mengandung nutrisi dan menjaga nilai gizi dari pangan yang mudah rusak.

#### 4. Stabilitas

Dimensi terakhir yaitu stabilitas merupakan penopang ketiga dimensi di atas, dimana berkaitan dengan akses kepada pangan, bahkan saat mengalami situasi mendadak seperti krisis ekonomi atau krisis lingkungan. Memastikan stabilitas pangan dalam ketersediaan, akses dan pemanfaatan sudah menjadi perhatian utama banyak negara, bahkan menjadi topic utama institusi internasional yang memiliki perhatian dalam topik pangan dan agrikultur. Setiap negara memiliki cara yang berbeda dalam menangani stabilitas pangan mereka. Hal ini disebabkan karena resiko dan ancaman terhadap pangan tersebut memiliki ketidakpastian yang berbeda pula. Resiko tersebut dapat berasal dari berbagai sumber seperti cuaca, bencana alam, resiko biologis dan lingkungan, terorisme pangan dan bio-terorisme, resiko pasar, resiko terkait logistik dan infrastruktur, resiko management dan operasional, resiko terkait kebijakan institusi, dan resiko politik. Sehingga stabilitas dapat ditangani dari beragam cara sesuai dengan kondisi terkait<sup>21</sup>.

Pada penulisan skripsi ini juga, penulis menggunakan konsep kerjasama internasional dan juga konsep organisasi internasional. Konsep Kerjasama Internasional menurut Robert Keohane adalah terjadi ketika negara menyesuaikan perilaku mereka dengan preferensi orang lain yang sebenarnya atau yang diantisipasi sehingga kebijakan yang benar-benar disetujui oleh satu pemerintah dianggap oleh para mitranya sebagai alat untuk memfasilitasi realisasi tujuan mereka sendiri<sup>22</sup>. Kerjasama internasional dilakukan demi mencapai hasil yang dapat digunakan sebagai alat bersama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam buku *International Organizations*, Clive Archer menyebutkan bahwa Organisasi Internasional adalah sistem formal yang memiliki aturan, tujuan dan instrument baik secara rasional dan organisasi serta memiliki kelengkapan baik secara fisik dan administratif dalam menjalankan fungsinya<sup>23</sup>. Peran Organisasi Internasional adalah untuk merefleksikan kepentingan bersama negara anggota, yang secara alami diatur untuk jangka

---

<sup>21</sup> Ibid hlm. 117-120.

<sup>22</sup> Robert Keohane mengenai Kerjasama Internasional dalam Dunne, Kurki "International Relations Theories".

<sup>23</sup> Clive Archer, *International Organizations*, Hlm 2

panjang. Sedangkan untuk mencapai kepentingan tersebut, Organisasi Internasional dapat berjalan jika terdapat partisipasi aktif dari negara anggota yang terlibat di dalamnya<sup>24</sup>.

## **1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian terkait, penulis memilih metode analisis data kualitatif sebagai dasar metode penelitian. Kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang mengacu pada pengumpulan serta teknik analisis data berdasarkan data non-numerik. Data non-numerik tersebut lebih memberikan pemahaman kepada peneliti mengenai pengalaman, perspektif serta konteks sejarah data. Sharan B. Merriam berpendapat bahwa pada penelitian kualitatif, para peneliti lebih tertarik untuk mengetahui dan mengerti bagaimana manusia menginterpretasikan pengalaman mereka, bagaimana mereka mengkonstruksikan dunia mereka dan memaknai hal tersebut<sup>25</sup>. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah metode berbasis studi pustaka. Sumber data akan mayoritas berasal dari basis buku, jurnal dan internet.

## **1.7 Sistematika Pembahasan**

Bab I berisi mengenai pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran yang didalamnya berisi teori dan konsep dalam membahas isu terkait, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan masalah terkait.

Bab II berisi mengenai penjelasan mengenai *The Food and Agriculture Organization* (FAO) sebagai Organisasi Internasional. Bab ini membahas bagaimana dibentuknya FAO serta apa peran FAO dalam menjalankan perannya sebagai salah satu aktor dalam dunia Hubungan Internasional. Bab ini juga membahas mengenai keanggotaan Indonesia dalam FAO, bagaimana Indonesia bergabung bersama FAO, hingga bagaimana FAO merumuskan program dan proyeknya di Indonesia.

---

<sup>24</sup> Werner J. Feld, *International Organizations: A Comparative Approach*, Hlm 10

<sup>25</sup> Sharan B. Merriam, "Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation." Hlm. 5

Bab III berisi penjelasan mengenai kondisi ketahanan dan kerentanan pangan di Indonesia pada umumnya dan Papua pada khususnya. Dalam bab ini diberikan penggambaran mengenai ketahanan pangan per wilayah dan bagaimana perbandingan antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Pada bagian akhir diberikan penjelasan mengenai kondisi ketahanan dan kerentanan pangan di Papua, bagaimana kondisi ketahanan pangan dilihat dari 4 pilar ketahanan pangan.

Bab IV berisi penjelasan mengenai proyek dan program apa saja yang disusun dan dilakukan oleh FAO dalam periode waktu 2010-2019 dalam upaya mengentaskan kerentanan pangan di Papua. Dalam bab ini dijelaskan mengenai bentuk program dan proyek tersebut, serta dampak yang diberikan dari program dan proyek tersebut terhadap ketahanan pangan masyarakat provinsi Papua. Selain itu juga, pada bab IV ini penulis menganalisis kerjasama yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dan FAO dari program dan proyek yang berjalan tersebut dengan menggunakan teori Neoliberalisme.

Bab V berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Dalam bagian kesimpulan juga penulis menjawab pertanyaan penelitian yang telah menjadi dasar pertanyaan dari penelitian terkait berdasarkan analisis yang telah di uraikan oleh penulis di bab sebelumnya.

